

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.01.2.692007/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
- 3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR
- 4. Kode>Nama Satker : (692007) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
- Sebesar : Rp. 16.520.990.000 (ENAM BELAS MILIAR LIMA RATUS DUA PULUH JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.01.WA Program Dukungan Manajemen
- 135.01.WA. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Jumlah Uang

Rp. 16.520.990.000
Rp. 16.520.990.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 16.520.990.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN SURABAYA II (135) Rp. 16.520.990.000

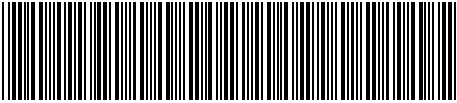
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692007/2026
I A. INFORMASI KINERJA



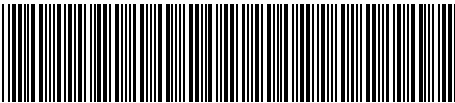
DS:6915-6602-5528-4096

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (692007) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman : I A. 1

Program	:	135.01.WA	Program Dukungan Manajemen				16.520.990.000	
Kegiatan	:	7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum				16.520.990.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		6,00	Layanan, Perkara	13.035.471.000
Rincian Output	:	01	EBA.001	Layanan Kerja Sama		1.00	Layanan	149.156.000
		02	EBA.959	Layanan Protokoler		1.00	Layanan	176.131.000
		03	EBA.962	Layanan Umum		1.00	Layanan	5.042.000
		04	EBA.994	Layanan Perkantoran		1.00	Layanan	12.692.210.000
		05	EBA.Z03	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1.00	Layanan	5.580.000
		06	EBA.Z07	Layanan BMN		1.00	Layanan	7.352.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		54,00	Unit, m2, Paket	3.296.725.000
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal		52.00	Unit	1.224.725.000
		02	EBB.971	Layanan Prasarana Internal		2.00	Unit	2.072.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		120,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	68.816.000
Rincian Output	:	01	EBC.Z10	Layanan Manajemen SDM		120.00	Orang	68.816.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		7,00	Layanan, Rekomendasi	119.978.000
Rincian Output	:	01	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah		1.00	Layanan	49.485.000
		02	EBD.Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		2.00	Rekomendasi	8.324.000
		03	EBD.Z27	Layanan Manajemen Keuangan		1.00	Layanan	13.393.000
		04	EBD.Z32	Layanan Reformasi Kinerja		1.00	Layanan	21.482.000
		05	EBD.Z34	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1.00	Layanan	5.757.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692007/2026
I A. INFORMASI KINERJA

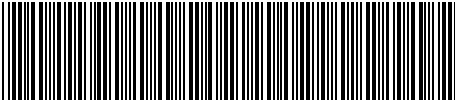


DS:6915-6602-5528-4096

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (692007) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Layanan Manajemen Kinerja Internal				Layanan, Rekomendasi	
06	EBD.Z36	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah		1.00	Layanan 21.537.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692007/2026
I B. SUMBER DANA



DS:6915-6602-5528-4096

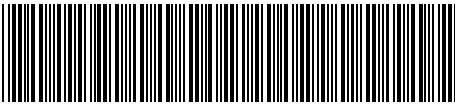
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (692007) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	16.520.990.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	16.520.990.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692007/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



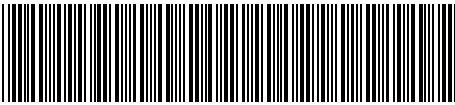
DS:6915-6602-5528-4096

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (692007) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692007	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR	9.268.422	3.955.843	3.296.725	-	-	16.520.990	05 . 51	
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	9.268.422	3.955.843	3.296.725	-	-	16.520.990		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	9.268.422	3.955.843	3.296.725	-	-	16.520.990		
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	9.268.422	3.767.049	-	-	-	13.035.471		
01	RM	9.268.422	3.767.049	-	-	-	13.035.471		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	-	3.296.725	-	-	3.296.725		
01	RM	-	-	3.296.725	-	-	3.296.725		
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	68.816	-	-	-	68.816		
01	RM	-	68.816	-	-	-	68.816		
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	119.978	-	-	-	119.978		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692007/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6915-6602-5528-4096

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (692007) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
Kewenangan : (KD)

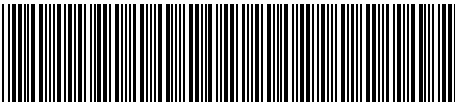
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
01 RM		-	119.978	-	-	-	119.978	135	
JUMLAH		9.268.422	3.955.843	3.296.725	-	-	16.520.990		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692007/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6915-6602-5528-4096

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (692007) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

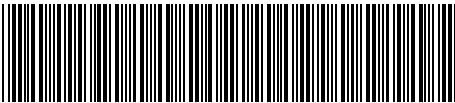
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692007	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	679.621	1.148.328	1.825.053	1.498.313	1.141.865	1.667.630	1.231.666	1.415.892	1.306.723	1.297.586	1.202.249	2.106.067	16.520.990
		BELANJA PEGAWAI	653.893	663.005	1.019.176	663.005	663.005	1.019.176	663.005	663.005	663.005	663.005	663.005	1.272.140	9.268.422
		BELANJA BARANG	25.728	278.353	515.285	333.588	335.465	366.406	368.661	330.887	358.458	329.111	339.244	374.657	3.955.843
		BELANJA MODAL	0	206.970	290.592	501.720	143.395	282.048	200.000	422.000	285.260	305.470	200.000	459.270	3.296.725
		Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	679.621	1.148.328	1.825.053	1.498.313	1.141.865	1.667.630	1.231.666	1.415.892	1.306.723	1.297.586	1.202.249	2.106.067	16.520.990
		51 BELANJA PEGAWAI	653.893	663.005	1.019.176	663.005	663.005	1.019.176	663.005	663.005	663.005	663.005	663.005	1.272.140	9.268.422
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	25.728	278.353	515.285	333.588	335.465	366.406	368.661	330.887	358.458	329.111	339.244	374.657	3.955.843
		53 BELANJA MODAL	0	206.970	290.592	501.720	143.395	282.048	200.000	422.000	285.260	305.470	200.000	459.270	3.296.725

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692007/2026
IV A. B L O K I R



DS:6915-6602-5528-4096

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [692007] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

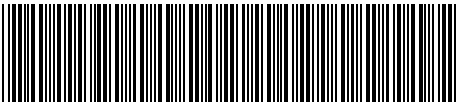
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692007/2026
IV B. C A T A T A N



DS:6915-6602-5528-4096

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [692007] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692007	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR		
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 2.072.000		
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		
	* Revitalisasi Jaringan Instalasi Listrik : (1) Gedung Sekretariat dan Bagian Rp. 2.072.000		
	Umum 790 m2, (2)Gedung Pelayanan Hukum 440 m2		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA